

TAJUK RENCANA

Pelibatan TNI untuk Penguatan



Terorisme masih mengancam kita. Di saat bangsa diserang pandemi, Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri pun masih saja disibukkan menangkap terduga teroris.

Belum lagi menyangkut proses pencegahan ataupun deradikalisasi. Hingga akhir 2019, jumlah narapidana terorisme tercatat sekitar 400 orang, sementara jumlah tahanan terorisme sekitar 190 orang. Mereka tersebar di 90 lembaga pemasyarakatan dan 3 rumah tahanan negara di 26 provinsi. Alih-alih deradikalisasi, yang terjadi malah sebaliknya justru terjadi radikalisasi di banyak lapas. Angka residivis narapidana terorisme di Indonesia pun masih tinggi, yaitu 8 persen.

Semua elemen bangsa haruslah bahu-membahu, mengatasi kejahatan serius yang membahayakan berbagai kehidupan masyarakat, keamanan, ideologi, bahkan kedaulatan negara ini.

Oleh karena itu, masuknya draf rancangan Peraturan Presiden tentang Tugas TNI dalam Mengatasi Aksi Terorisme yang akan dikonsultasikan dengan DPR merupakan langkah maju. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme pun mengamankan hal ini.

Dalam tataran praksis, memang ada hal-hal yang memerlukan pelibatan TNI. Tidak bisa upaya penanggulangan terorisme dibebankan seluruhnya hanya di pundak Polri atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Dalam kondisi-kondisi tertentu, terorisme mengancam obyek-obyek vital negara, bahkan kepala negara.

Kendati demikian, draf perpres ini perlu dicermati. UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI mengatur kemungkinan pelibatan TNI dalam mengatasi terorisme. Namun, hal itu membutuhkan keputusan politik negara, yakni keputusan presiden dan DPR. Perpres ini dinilai belum mengaturnya secara jelas. Terminologi yang digunakan dalam perpres, seperti fungsi penangkalan, bahkan belum diatur dalam UU.

Kriteria pelibatan TNI terkait ancaman tinggi juga belum jelas sehingga dikhawatirkan bisa melebar dan pada akhirnya malah berpotensi bertabrakan dengan peran Polri. Rancangan perpres tersebut juga dinilai berpotensi melanggar hak asasi manusia dalam pelaksanaannya serta mengandung banyak ketentuan yang bertentangan dengan sejumlah perundang-undangan.

Belum lagi, ada kekhawatiran perpres tersebut dapat mendegradasi kedudukan BNPT yang dalam undang-undang sebagai lembaga yang berada di depan dalam menanggulangi terorisme. Apabila hal itu terjadi, malahan akan menimbulkan kerancuan di lapangan yang dapat merugikan.

Sejumlah kalangan bahkan mendorong pemerintah menarik kembali draf perpres. Apabila proses dilanjutkan, rapat konsultasi antara pemerintah dan DPR menjadi titik krusial. Kita berharap pelibatan TNI dirumuskan secara tepat sehingga terjadi penguatan, bukan malah pelemahan.

Saudi di Antara AS dan Rusia



Di tengah pandemi Covid-19, Arab Saudi menekan kontrak pembelian senjata dengan Boeing. Di sisi lain, dalam bulan ini juga, Arab Saudi mengimpor gandum dari Rusia.

Kontrak baru Boeing-Riyadh diumumkan oleh Pentagon, Kamis (14/5/2020), sepekan setelah Amerika Serikat (AS) menyatakan mulai menarik sistem pertahanan udara Patriot dari Arab Saudi. Arab Saudi membeli 1.050 rudal canggih, terdiri dari 650 rudal jelajah SLAM ER dan 400 rudal antikapal Harpoon Block II. Dua kontrak yang ditandatangani itu bernilai lebih dari 2 miliar dollar AS (Kompas, 15/5/2020).

Terakhir, Boeing mengirimkan sistem senjata SLAM ER ke Arab Saudi tahun 2008. Kontrak baru ini juga memastikan kelanjutan program Harpoon hingga 2026 dan memulai kembali jalur produksi SLAM ER. "Kami senang bisa melanjutkan warisan panjang kemitraan kami untuk membangun senjata yang membeli AS dan mitra internasionalnya," kata Cindy Gruensfelder, Wakil Presiden Boeing Weapons.

Di sisi lain, kantor berita Reuters melaporkan, sudah dua kali dalam bulan Mei ini, Rusia mengapalkan gandum ke Saudi. Pengiriman gandum pertama sebanyak 60.000 ton sudah tiba di Arab Saudi sekitar seminggu lalu. Kargo kedua sebanyak 61.700 ton baru meninggalkan Rusia, eksportir gandum utama dunia, awal Mei lalu, dan diperkirakan tiba akhir bulan ini. Pengimpornya adalah perusahaan negara SAGO.

Pandemi Covid-19 telah memukul ekonomi dunia, termasuk Arab Saudi, AS, dan Rusia. Pembelian senjata atau gandum hanya sedikit membantu pergerakan ekonomi kedua negara. Kasus positif Covid-19 AS terbanyak di dunia dengan jumlah 1.457.593 positif, 86.912 meninggal, dan 318.027 sembuh. Sementara Rusia berada di posisi ketiga dengan 262.843 kasus positif, 2.418 meninggal, dan 58.226 sembuh.

Ekonomi Arab Saudi juga terdampak pandemi Covid-19, antara lain akibat permintaan minyak dunia melemah dan harga minyak yang terus merosot. Maskapai di Arab Saudi, misalnya, diperkirakan rugi hingga 7,5 miliar dollar AS karena pandemi yang menghancurkan permintaan perjalanannya.

Pada rapat Selasa (12/5), kabinet Arab Saudi mendesak negara-negara penghasil minyak tidak harus mematuhi pemotongan produksi yang sudah disepakati. Mereka juga berharap negara produsen mau mengurangi produksi, di luar kesepakatan, untuk membantu memulihkan keseimbangan pasokan minyak di pasar global.

Mengapa di tengah kondisi ekonomi yang sulit Arab Saudi menekan kontrak dengan Boeing? Apakah Arab Saudi melihat ancaman besar Iran? Ataukah ada sebab lain yang membuat Saudi harus segera menandatangani perjanjian meskipun pelaksanaan kesepakatan itu masih tahun 2028.

Pertanyaan ini segera muncul mengingat Iran, musuh besar Arab Saudi dalam perebutan pengaruh di Timur Tengah, sibuk mengatasi pandemi. Ataukah pembelian gandum dan senjata itu menjadi sinyal kedekatan Saudi dengan AS dan Rusia? Atau agenda tersembunyi lain Saudi menghadapi krisis ekonomi akibat pandemi.

KOMPAS

TERBIT SEJAK 28 JUNI 1965

Pemimpin Umum:	Jakob Oetama
Wakil Pemimpin Umum:	Lilik Oetama, Budiman Tanurejjo
Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:	Sutta Dharmasaputra
Wakil Pemimpin Redaksi:	Mohammad Bakir, P. Tri Agung Kristanto,
Redaktur Senior:	Ninok Leksano, Rikard Bagun, Ninuk Mardiana Pambudy
Redaktur Pelaksana:	Adi Prinanto
Wakil Redaktur Pelaksana:	Marcellus Hernowo, Antonius Tomy Trinugroho, Haryo Damardono
Sekretaris Redaksi:	Subur Tjahjono, Iliham Khoiri

Pandemi di Puncak Bonus Demografi

Sonny Harry B Harmadi

Ketua Umum Koalisi Kependudukan Indonesia: Pengajar Departemen Studi Pembangunan FDKBD ITS



DIDIE SW

"Momentumnya adalah sekarang tatkala kita antara 2020 hingga 2024 berada di puncak periode bonus demografi. Jika kita lebih fokus mengembangkan kualitas SDM dan menggunakan cara-cara baru, maka saya yakin bonus demografi menjadi bonus lompatan kemajuan..."

Pidato Kenegaraan Presiden Jokowi, 16/8/2019

Sejak memasuki periode bonus demografi pada 2012, rasio ketergantungan Indonesia terus turun di bawah angka 50. Maknanya, setiap 100 penduduk usia produktif menanggung kurang dari 50 penduduk usia nonproduktif.

Data proyeksi penduduk tahun 2015-2045 BPS berdasarkan Survei Penduduk Antarsensus (Supas) 2015 mendukung penggalan pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo di atas. Indonesia berada di puncak bonus demografi selama 2020 hingga 2024, dengan rasio ketergantungan di angka 45. Periode ini disebut *the window of opportunity*, sebuah kesempatan singkat yang harus dimanfaatkan secara cepat.

Setelah 2024, perlahan tetapi pasti, rasio ketergantungan terus naik. Beban tanggungan penduduk usia produktif akan meningkat seiring naiknya rasio ketergantungan. Bonus demografi diperkirakan berakhir antara tahun 2038 dan 2041 mendatang. Namun, harapan dan kenyataan tak selamanya sama. Memasuki 2020, dunia dilanda pandemi global Covid-19, tak terkecuali Indonesia. Covid-19 tidak hanya menular secara medis, tetapi juga sosial-ekonomi. Krisis kesehatan telah berubah menjadi krisis kemanusiaan yang menimbulkan krisis ekonomi dan sosial secara global. Menghentikan sebagian besar aktivitas dunia. Setidaknya 15 negara yang masuk 20 besar negara dengan perekonomian terbesar di dunia justru menghadapi kenyataan jumlah kasus positif Covid-19 terbanyak di dunia. Wabah ini menghantam semua lapisan masyarakat, baik kelompok kaya, menengah, miskin, maupun semua umur dari mulai bayi hingga lansia, tanpa terkecuali.

Butuh strategi yang tepat agar pada masa pandemi ini, *the window of opportunity* tak berubah jadi *the door to disaster*. Sebuah negara dikatakan berhasil memanfaatkan bonus demografi jika mampu mentransformasikannya

menjadi bonus kesejahteraan. Intinya, sebelum periode bonus demografi berakhir pada 2038-2041, Indonesia sudah harus masuk dalam kelompok negara dengan IPM sangat tinggi dan negara berpendapatan per kapita tinggi. Setelah berakhirnya periode bonus demografi, jika pendapatan per kapita tinggi, para lansia dapat membiayai hidupnya dari tabungan dan aset produktif. Tak tergantung dari penduduk usia produktif. Apabila ini terwujud, setelah 2041 kita dapat meraih *the second demographic dividend* (bonus demografi kedua).

Mitigasi dampak pandemi

Setidaknya ada empat pilar utama bonus demografi, yaitu pendidikan, kesehatan, produktivitas (lapangan kerja), dan keluarga berencana (KB). Mutlak dibutuhkan upaya mitigasi dampak Covid-19 terhadap keempatnya. Pilar pertama, pendidikan. UNESCO akhir Maret lalu mencatat ada 165 negara di dunia yang menutup sekolah dan kampusnya. Lebih dari semiliar penduduk muda dunia tak lagi berada di sekolah. Di Indonesia ada lebih dari 50 juta siswa dan mahasiswa terdampak, tidak dapat melaksanakan pendidikan secara normal. Banyak sekolah, guru, dan orangtua yang saat ini terlibat aktif mendukung proses belajar anak dari rumah. Namun, terdapat potensi penurunan kualitas pendidikan anak-anak kita.

Menyikapi kondisi yang ada, pemerintah bersama pelaku pendidikan nasional perlu menciptakan beberapa skenario pembelajaran. Tidak hanya merancang metode pembelajaran secara digital, tetapi juga nondigital. Tetap harus ada strategi pembelajaran tanpa teknologi. Tak semua siswa dan mahasiswa memiliki komputer dan akses internet. Kalupun punya, belum tentu mampu membiayai pembelajaran dengan teknologi. Jika hanya mereka yang kaya dapat tetap belajar, ketimpangan akan semakin tinggi. Dalam kondisi pandemi, kita dituntut untuk mencari solusi agar pendidikan tetap berjalan dan inklusif.

Kita juga harus memastikan angka putus sekolah (*drop out*) pasca-Covid-19 tidak naik. Putusnya waktu belajar bagi sebagian penduduk usia sekolah, ditambah kesulitan ekonomi, dapat berpengaruh terhadap motivasi siswa untuk melanjutkan pendidikan. Jika angka putus sekolah naik, variabel harapan lama sekolah penduduk usia muda dalam IPM akan turun. Berpengaruh terhadap kinerja pembangunan manusia Indonesia secara keseluruhan. Setelah pandemi berakhir, pema bersama sekolah harus melakukan strategi "jemput bola" bagi siswa yang tidak kembali ke sekolah.

Pilar kedua, kesehatan. Konsentrasi

pengerahan sumber daya untuk penanganan Covid-19 dapat berakibat pada menurunnya sumber daya untuk pelayanan kesehatan lainnya. Program imunisasi, perbaikan gizi anak balita, pelayanan kesehatan ibu hamil dan melahirkan, ataupun penanganan penyakit lainnya dapat mengendur. Jika tidak ditangani secara proporsional, justru kita bisa mengalami penurunan kinerja kesehatan pasca-Covid-19.

Setidaknya fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama (FKTP) sebagai garda terdepan tetap dapat memberi layanan kesehatan non-Covid-19. Dibarengi prosedur untuk mencegah penularan Covid-19. Ketersediaan pangan harus tetap dijaga untuk memenuhi gizi penduduk. Terutama pemenuhan gizi 1.000 hari pertama kehidupan di mana penyediaan gizi ibu hamil, ibu menyusui, dan anak di bawah dua tahun menjadi prioritas. Kita tak ingin generasi emas ini terabaikan. Jika gizi ibu hamil dan bayi tak terpenuhi, risiko kematian bayi meningkat dan berdampak penurunan usia harapan hidup penduduk Indonesia.

Pilar ketiga menyangkut produktivitas dan lapangan kerja. Pandemi menyebabkan tambahan pengangguran yang sulit dihindari. Aktivitas ekonomi perkotaan mengalami kontraksi dengan konsekuensi menurunnya kesempatan kerja. Berdasarkan Sakernas Agustus 2019, terdapat 126,5 juta pekerja di Indonesia. Sekitar 56 persen di antaranya bekerja di sektor informal yang sangat terdampak Covid-19. Di saat butuh lapangan kerja yang layak agar kita dapat mentransformasi bonus demografi jadi bonus kesejahteraan, justru kesempatan kerja turun dan pengangguran naik.

Pemerintah beserta dunia usaha perlu merespons dengan tepat. Pendataan pengangguran sangat penting. Data

pengangguran bisa diperoleh selama pendataan penerima program perlindungan sosial yang diluncurkan pemerintah bagi masyarakat terdampak Covid-19. Pemerintah perlu punya data pengangguran yang lebih baik, *by name by address*. Serupa dengan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) untuk program perlindungan sosial, kita perlu memiliki data terpadu pencari kerja. Dengan data ini, pemerintah dapat menetapkan karakteristik pencari kerja. Mulai dari umur, jenis kelamin, pendidikan, keahlian, hingga pengalaman kerja, dan sebagainya. Informasi demografi, sosial, ekonomi, dan pencari kerja berguna buat perencanaan pasar kerja.

Pemerintah bersama dunia usaha dapat mengidentifikasi jenis dan sektor pekerjaan apa saja yang *match* dengan kondisi pekerja kita sehingga strategi investasi dan *job creation* akan lebih tepat sasaran. Jika kesempatan kerja yang tercipta cocok dengan kualifikasi dan preferensi pekerja kita, produktivitas pekerja akan lebih baik. Berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan pendapatan pekerja. Produktivitas tinggi mempercepat transformasi bonus demografi menjadi bonus kesejahteraan.

Pilar keempat terkait program KB. Berdasarkan data Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2017, sekitar 72 persen perempuan usia subur berstatus kawin yang menggunakan cara KB modern, memilih pil dan suntik. Kedua metode kontrasepsi jangka pendek itu membutuhkan pelayanan KB reguler. Kebijakan untuk tetap berada di rumah dan terbatasi-pelayanan KB selama masa pandemi berpotensi meningkatkan angka kehamilan dan kelahiran. Apalagi bagi pasangan usia subur yang tak ikut program KB. Kenaikan angka kelahiran yang besar akan meningkatkan rasio ketergantungan dan memperpendek periode puncak bonus demografi. Kehamilan pada kelompok perempuan berisiko tinggi juga dapat menaikkan angka kematian ibu melahirkan. BKKBN melalui para penyuluh dan tenaga medis harus aktif memberi pelayanan "jemput bola" sehingga kehamilan yang tak dikehendaki dengan segala risikonya dapat dihindari.

Memitigasi dampak pandemi terhadap keempat pilar bonus demografi sama pentingnya dengan penanganan Covid-19 itu sendiri. Meskipun pandemi memaksa kita mundur satu dua langkah ke belakang, kita harus optimistis. Dengan respons kebijakan yang tepat, momentum puncak bonus demografi dapat kita manfaatkan untuk mengayuh banyak lompatan kemajuan pasca-pandemi.

Pascakorona: Inovasi sebagai Ideologi Global

Muhadji M Darwin

Guru Besar Manajemen dan Kebijakan Publik Fakultas Ilmu-ilmu Sosial dan Politik UGM

Dunia tengah berada dalam krisis yang luar biasa, yaitu pandemi Covid-19. Di awal perkembangan pandemi, banyak yang mereehkan kegentingannya. Sekarang, semua sepakat pandemi ini luar biasa serius bagi dunia jika dilihat dari banyaknya negara terpapar, banyaknya korban terinfeksi dan meninggal, serta implikasinya bagi dunia. Dampak yang di depan mata adalah krisis ekonomi global, termasuk di Indonesia. Namun, lebih dari sekadar krisis ekonomi, pandemi ini telah mengoreksi tatanan geopolitik global.

Faktor kunci untuk dapat keluar dari krisis global ini adalah daya inovasi. Bangsa yang menang di persaingan global adalah bangsa yang unggul dalam berinovasi, bangsa yang menjadikan inovasi ideologi barunya.

Pasca-Perang Dunia II, dunia ditata menurut kekuatan senjatanya, lalu tercipta dua blok, Blok Barat yang dikomandani Amerika Serikat dan Blok Timur yang berpusat di Uni Soviet. Dikotomi global seperti ini telah lama cair ketika Uni Soviet bubar dan negara-negara Eropa Timur meninggalkan komunisme. Sementara China, meski masih mempertahankan komunisme sebagai ideologi negara, sistem ekonomi yang dibangun sudah berubah mendasar, jadi berorientasi pada pasar global.

Pasca-Covid-19, hegemoni Barat yang dipimpin AS jadi kehilangan relevansinya. Dunia Barat terbukti gagal melawan pandemi. China, negara pertama yang terserang Covid-19, telah berhasil lolos karena kombinasi kekuatan inovasi dalam melawan pandemi dan birokrasi komando yang bekerja efektif memutus mata rantai penularan virus. Protokol kesehatan yang berhasil diterapkan di Chi-

na gagal diterapkan di sejumlah negara Barat yang penduduknya sangat melek huruf dan punya tradisi disiplin di tempat publik yang kuat.

Kini, setelah Covid-19, China tak dapat dihindari atau dicegah untuk jadi negara adikuasa baru menggantikan AS. China kini disebut "negeri teknologi dengan ribuan inovasi". Inovasi telah menjadi ideologi baru di China. Kuatnya inovasi ini salah satunya tampak dalam sistem mata uang. Di tengah pandemi korona ini, China tengah merenungi terobosan baru di bidang keuangan dengan menginisiasi *e-currency* atau e-RMB yang digunakan dalam sistem pembayaran nasional, termasuk pemberian gaji pegawainya.

Model *currency* baru ini telah berhasil diujicobakan di China. Bukan tak mungkin, dalam waktu dekat, e-RMB akan jadi mata uang global menggantikan dollar AS.

Secara mengejutkan China telah memutuskan membatalkan patokan dollar AS dalam transaksi bursa dan secara resmi menggunakan yuan, bukan lagi dollar AS. Dengan keputusan ini, dollar tak lagi di-regunakan dalam perdagangan China dan nilai dollar AS pun diperkirakan akan jatuh.

Di sisi lain, ekonomi AS kini jadi rapuh karena Covid-19. Anggarannya defisit luar biasa, dan Trump menutupinya dengan memperbanyak utang negara sehingga ia kini dijuluki "raja utang". Maka, masuk akal untuk menduga, China akan memimpin perekonomian dunia. Akan terjadi perubahan mendasar dalam tata geopolitik dunia. Dunia tak lagi dikendalikan kekuatan senjatanya, tetapi kekuatan inovasi. Pemenangnya bukan AS, melainkan China.

Bagaimana ini menjadi mungkin? Pertama, hegemoni

AS yang berpusat pada kekuatan nuklir dan dollar AS kini telah terkoreksi oleh hadirnya Covid-19. AS yang unggul di senjata "mati gaya" melawan pandemi, sementara China berhasil mengatasinya melalui inovasi dan disiplin warga mengimplementasikan inovasinya.

Dominasi "soft power"

Kedua, mengikuti pandangan Joseph Nye Jr (2005), persaingan global mengandalkan *hard power* (seperti kekuatan senjata) sudah lampau. Sekarang kita berada pada era peradaban baru, di mana utilitas *soft power* (kekuatan yang lembut) jadi kunci kemenangan dalam persaingan global. Ramalan Samuel Huntington (2011) bahwa setelah berakhirnya Perang Dingin akan muncul konflik baru yang bersumber pada identitas agama; antara Barat yang Kristen dan Yahudi dan dunia Islam, ternyata tak terbukti.

Ramalan ini hanya benar dalam jangka pendek, yaitu maraknya terorisme Islam dan tumbuhnya radikalisme Islam anti-Barat di negara-negara Islam. Itu pun banyak yang menduduhnya sebagai produk rekayasa Barat. Namun, setelah Covid-19, perilaku beragam seperti itu sudah tak populer dan tak efektif lagi. Agama justru tengah mencair menjadi ideologi yang lebih terbuka dan damai. Dunia Barat tak lagi melihat agama Islam sebagai ancaman. Hal ini tampak dari beberapa gejala baru yang muncul. Ketika di Selandia Baru seorang warga kulit putih yang sangat anti-Islam memberondong peluru dan menewaskan 50 orang di masjid, masyarakat justru kemudian menjadi dekat dan melampiaskan empati mereka terhadap praktik ibadah Islam di negara tersebut.

Di AS dan sejumlah negara

Eropa yang secara politik didominasi warga berkulit putih dan beragama Kristen atau Yahudi, kehadiran Islam tak menimbulkan aksi permusuhan dari warga Kristen dan Yahudi di sana. Justru kehadiran mereka dapat pengakuan sosial, seperti menangnya sejumlah politisi Islam menduduki jabatan publik. Kini, London punya wali kota Muslim pertama, Sadiq Khan, dan kota Montgomery, New Jersey, AS, punya wali kota Muslimah pertama, Sadaf Jaffer. Bisa seperti itu karena pendekatan Islam tak menggunakan pedang (*hard power*), apalagi melakukan teror, tetapi menggunakan *soft power*, yaitu komunikasi sosial yang damai.

Ini juga yang terjadi pada kasus inovasi di atas. China berhasil menang dalam kompetisi global, tak melalui perang atau adu senjata, tak pula dengan menggangungkan ideologi komunisme yang "sangat", tetapi melalui kekuatan inovasi, yang karakternya juga *soft*. Kesimpulannya, kunci kesuksesan dalam perancangan politik global ini bukan lagi tergantung *hard power*, melainkan pada *soft power*.

Setelah Covid-19, bukan ideologi ekonomi yang menonjol, bukan pula ideologi agama. Semua agama akan tetap hadir, tetapi bukan agama yang ngedepankan *hard power*-nya, melainkan pada keunggulan *soft power*: yaitu nilai dan pesan agama yang damai. China barangkali akan jadi negara adidaya baru, tetapi bukan dalam konteks penguatan senjata militer untuk perang. Menangnya China dalam perancangan politik dan ekonomi global tak dapat diartikan sebagai kemenangan komunisme atas kapitalisme karena ekonomi China sendiri berhasil tumbuh, bukan melalui pengerasan ideologi komunis, melainkan justru karena adap-

POJOK

Ketahanan keluarga diuji saat pandemi. Setiap hari di rumah saja, kian tahu siapa dia...

Sikap meremehkan jaga jarak membahayakan. Memang jangan anggap remeh apa pun.

DPR mengawal draf perpres pelibatan TNI. Lho, biasanya Dewan yang dikawal.

Mangkil